

Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal Berkelanjutan

Reta Herliyani

Universitas Teknologi Digital

Alamat Surat

Email: reta10524009@digitechuniversity.ac.id*

Article History:

Diajukan: 15 Juli 2026; Direvisi: 20 Agustus 2026 ; Accepted: 27 Agustus 2026

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis implementasi kebijakan MBG, potensi dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG memiliki potensi yang besar dalam menciptakan multiplier effect melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan lokal, pemberdayaan UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta perluasan lapangan kerja di berbagai sektor. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta tata kelola birokrasi yang terintegrasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model implementasi kebijakan pangan nasional yang mengintegrasikan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pembangunan ekonomi lokal berkelanjutan.

Kata kunci: Makan Bergizi Gratis, implementasi kebijakan, pembangunan ekonomi lokal, pembangunan berkelanjutan, UMKM

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals (MBG) Program is one of the Indonesian government's strategic policies aimed at improving the nutritional quality of society and promoting local economic development. This study employs a qualitative approach with a library research method to analyze the policy implementation of MBG, its potential impact on local economic development, and the challenges encountered in its execution. The findings indicate that MBG has significant potential to create a multiplier effect by increasing demand for local food products, empowering MSMEs, cooperatives, and Village-Owned Enterprises (BUMDes), and expanding employment opportunities across various sectors. The success of implementation is influenced by the effectiveness of communication, resource availability, implementer commitment, and integrated bureaucratic governance. This research contributes to the development of a national food policy implementation model that integrates human resource quality improvement objectives with sustainable local economic development.

Keywords: Free Nutritious Meals, policy implementation, local economic development, sustainable development, MSMEs.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan telah menjadi salah satu agenda utama dalam kebijakan pembangunan nasional maupun global, sebagaimana tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan pada tahun 2030 (United Nations, 2015). Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah di bidang pangan dan gizi semakin dipandang sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan rantai pasok pangan dan pemberdayaan pelaku usaha di tingkat daerah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan prioritas Pemerintah Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian lokal. Program ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) dan menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024–2029. Implementasi Program MBG melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan diharapkan mampu memberikan dampak positif tidak hanya bagi penerima manfaat langsung, tetapi juga bagi perekonomian lokal melalui pemberdayaan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi sebagai mitra pengadaan pangan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program pemerintah dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antarpemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya, serta kesiapan kelembagaan di tingkat daerah. Model implementasi kebijakan Edward III (1980) mengidentifikasi empat dimensi utama yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Program MBG, keempat dimensi tersebut menjadi faktor yang sangat relevan mengingat kompleksitas aktor yang terlibat dan luasnya cakupan program di seluruh wilayah Indonesia.

Berbagai penelitian mengenai school feeding programme di berbagai negara menunjukkan bahwa penyediaan makanan bergizi di sekolah tidak hanya meningkatkan status gizi dan prestasi akademik peserta didik, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal melalui peningkatan permintaan pangan dan pemberdayaan UMKM (FAO, 2024; World Food Programme, 2022; World Bank, 2022).

Berdasarkan telaah literatur tersebut, masih terdapat research gap karena sebagian besar penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan MBG dengan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dalam konteks Indonesia. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan model analisis yang mengintegrasikan teori implementasi kebijakan dan pendekatan Local Economic Development (LED).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang mengintegrasikan dimensi implementasi kebijakan publik dengan konsep Local Economic Development (LED) dalam konteks kebijakan pangan nasional Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis, mengidentifikasi potensi dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan implementasi program.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal berkelanjutan. Studi kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber informasi ilmiah yang relevan guna membangun pemahaman yang komprehensif dan sistematis tentang topik penelitian (Creswell & Creswell, 2018).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, laporan resmi lembaga nasional dan internasional, jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer-review, serta dokumen resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN), World Bank, FAO, OECD, dan World Food Programme.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis (systematic literature search) dengan menggunakan kata kunci yang relevan terkait Program Makan Bergizi Gratis, implementasi kebijakan publik, school feeding programme, pembangunan ekonomi lokal, Local Economic Development, UMKM, serta ketahanan pangan. Sumber literatur yang digunakan mencakup database jurnal internasional seperti Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect, serta situs resmi lembaga pemerintah dan organisasi internasional.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan mengacu pada model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara induktif dengan membangun pola, tema, dan hubungan konseptual dari berbagai literatur yang dikaji.

Untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian, diterapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai jenis sumber yang berbeda, yakni regulasi kebijakan, laporan lembaga, dan temuan penelitian terdahulu. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengembangkan model konseptual implementasi Program MBG yang mengintegrasikan dimensi implementasi kebijakan dengan pembangunan ekonomi lokal berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Kebijakan Publik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mewujudkan pemerataan akses terhadap gizi berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional. Implementasi program ini dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) yang berfungsi sebagai koordinator utama dalam penyelenggaraan program MBG secara nasional (Badan Gizi Nasional, 2025).

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, satuan pendidikan, pelaku usaha lokal, koperasi, BUMDes, serta organisasi masyarakat. Kompleksitas koordinasi antarpemangku kepentingan tersebut menjadi tantangan utama sekaligus peluang strategis bagi penguatan tata kelola implementasi kebijakan pangan di Indonesia.

Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat dimensi tersebut saling berinteraksi dan menentukan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Pada dimensi komunikasi, implementasi Program Makan Bergizi Gratis memerlukan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Kejelasan petunjuk teknis, mekanisme pelaporan, dan sistem pengawasan merupakan faktor kritis yang menentukan konsistensi pelaksanaan program di seluruh wilayah Indonesia (Suprpto, Widodo, & Prasetyo, 2025).

Dimensi sumber daya menjadi faktor penting lainnya dalam menentukan keberhasilan implementasi MBG. Ketersediaan anggaran, infrastruktur distribusi pangan, kapasitas sumber daya manusia di satuan pelaksana, serta kesiapan rantai pasok pangan lokal merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dari aspek disposisi, keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis sangat dipengaruhi oleh komitmen, integritas, dan kapasitas para pelaksana di semua tingkatan. Pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap tujuan program cenderung mampu mengadaptasi kebijakan nasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal secara lebih efektif (Hadinata, 2026).

Sementara itu, struktur birokrasi yang jelas, adaptif, dan terkoordinasi merupakan prasyarat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan efisiensi pelaksanaan program. Penguatan koordinasi antara Badan Gizi Nasional, kementerian terkait, dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem implementasi yang terintegrasi dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, kapasitas kelembagaan, komitmen pelaksana, dan tata kelola birokrasi yang efektif. Oleh karena itu, penguatan keempat dimensi implementasi tersebut menjadi prioritas utama dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program di seluruh wilayah Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi yang signifikan dalam menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian lokal melalui peningkatan permintaan terhadap komoditas pangan lokal, pemberdayaan pelaku usaha, serta penguatan rantai pasok pangan daerah. Dalam perspektif ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk program pangan dapat menciptakan efek pengganda yang merangsang berbagai aktivitas ekonomi di sektor hulu dan hilir pangan (World Bank, 2024).

Dalam perspektif Local Economic Development (LED), pembangunan ekonomi akan berlangsung lebih berkelanjutan apabila mampu memanfaatkan sumber daya lokal, melibatkan pelaku usaha setempat, dan memperkuat kelembagaan ekonomi daerah. Implementasi Program MBG yang mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal dan melibatkan UMKM, koperasi, serta BUMDes sebagai mitra pengadaan memberikan peluang besar bagi penguatan ekonomi lokal di berbagai daerah (Blakely & Leigh, 2017; OECD, 2023).

Selain berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor terkait, seperti produksi pangan, pengolahan, distribusi, logistik, pengemasan, dan pengawasan kualitas. Dampak penciptaan lapangan kerja tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah (Badan Pusat Statistik, 2024; Setiabudi, Rahman, & Nugraha, 2025).

Tabel 1. Potensi Dampak Ekonomi Program Makan Bergizi Gratis terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal

No.	Sektor/Aspek	Bentuk Implementasi Program MBG	Dampak Ekonomi yang Dihasilkan	Indikator Keberhasilan
1	Pertanian	Pengadaan beras, sayuran, buah-buahan, dan komoditas hortikultura dari petani lokal	Meningkatkan permintaan hasil pertanian, pendapatan petani, dan produktivitas lahan	Peningkatan volume penjualan hasil panen, kenaikan pendapatan petani, serta stabilitas harga komoditas
2	Peternakan	Pengadaan telur, ayam, susu, dan daging dari peternak lokal	Meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan peternak	Bertambahnya jumlah pemasok lokal, peningkatan produksi, dan kenaikan pendapatan peternak
3	Perikanan	Pemanfaatan ikan segar dan produk perikanan lokal sebagai sumber protein	Meningkatkan produksi perikanan, memperkuat pasar lokal, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan	Peningkatan hasil tangkapan, volume penjualan, dan nilai ekonomi produk perikanan
4	UMKM Pangan	Penyediaan jasa pengolahan makanan, katering, bumbu, pengemasan, dan distribusi	Memperluas peluang usaha, meningkatkan omzet, serta mendorong pertumbuhan UMKM	Bertambahnya UMKM mitra, peningkatan omzet usaha, dan penyerapan tenaga kerja
5	Koperasi dan BUMDes	Koordinasi pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pengelolaan rantai pasok pangan	Memperkuat kelembagaan ekonomi desa dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan	Bertambahnya koperasi/BUMDes yang terlibat, peningkatan transaksi

				ekonomi lokal, dan efisiensi distribusi
6	Ketenagakerjaan	Penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi, distribusi, logistik, pengolahan, dan pengawasan mutu	Membuka lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor pendukung MBG
7	Logistik dan Transportasi	Distribusi bahan pangan dan makanan	Meningkatkan aktivitas logistik lokal	Bertambahnya jasa logistik dan frekuensi distribusi
8	Pemerintah Daerah	Penguatan penggunaan produk lokal	Meningkatkan aktivitas ekonomi dan ketahanan pangan	Meningkatnya transaksi ekonomi lokal dan PDRB sektor pangan

Sumber: Diolah penulis berdasarkan konsep *Local Economic Development* dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (2026).

Berdasarkan Tabel 1, implementasi Program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak ekonomi yang meluas pada berbagai sektor yang saling terhubung dalam rantai pasok pangan. Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan memperoleh manfaat melalui meningkatnya permintaan terhadap komoditas lokal yang digunakan sebagai bahan baku penyediaan makanan bergizi. Kondisi tersebut mendorong peningkatan produksi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha primer. Pada saat yang sama, keterlibatan UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam proses pengolahan, pengadaan, serta distribusi pangan menciptakan nilai tambah ekonomi yang memperkuat kelembagaan ekonomi lokal.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan terhadap jasa logistik, transportasi, penyimpanan, dan pengawasan mutu pangan turut membuka peluang kerja baru serta memperluas aktivitas ekonomi di tingkat daerah. Efek berganda (*multiplier effect*) yang dihasilkan menunjukkan bahwa manfaat Program Makan Bergizi Gratis tidak berhenti pada peningkatan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sistem pangan lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha mikro dan koperasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan konsep *Local Economic Development* yang menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal dan kolaborasi antarpemangku kepentingan merupakan prasyarat utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing (OECD, 2023; FAO, 2024).

Tantangan Implementasi Kebijakan MBG

Meskipun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan ekonomi lokal, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Tantangan tersebut mencakup aspek ketersediaan rantai pasok pangan, tata kelola pengadaan, koordinasi antarlembaga, hingga kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.

Tantangan pertama adalah belum meratanya kesiapan rantai pasok pangan lokal di berbagai wilayah Indonesia. Perbedaan kapasitas produksi pertanian, peternakan, dan perikanan menyebabkan kemampuan setiap daerah dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk Program MBG tidak sama. Daerah dengan produksi pangan yang terbatas berpotensi mengalami ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, sehingga dapat meningkatkan biaya distribusi dan menghambat tujuan pemberdayaan ekonomi lokal.

Tantangan kedua berkaitan dengan tata kelola pengadaan bahan pangan. Mekanisme pengadaan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel berpotensi mengurangi partisipasi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, koperasi, dan BUMDes. Oleh karena itu, sistem pengadaan perlu dirancang dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan yang sehat, serta keberpihakan terhadap produk lokal.

Selain itu, koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, satuan pendidikan, dan pelaku usaha menjadi tantangan penting dalam implementasi Program MBG. Tanpa koordinasi yang baik, proses pengadaan, distribusi, pengawasan mutu, serta pelaporan berpotensi mengalami berbagai kendala. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kolaboratif (*collaborative*

governance) menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Program MBG secara berkelanjutan (UNDP, 2024; OECD, 2023).

Implikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal Berkelanjutan

Berdasarkan hasil kajian literatur, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Potensi tersebut akan dapat diwujudkan secara optimal apabila implementasi program didukung oleh tiga prasyarat utama: penguatan kelembagaan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan tata kelola kebijakan yang efektif (OECD, 2023; FAO, 2024).

Penguatan kelembagaan diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, koperasi, BUMDes, kelompok tani, kelompok peternak, kelompok nelayan, serta UMKM. Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi lokal diwujudkan melalui kebijakan yang memprioritaskan penggunaan bahan pangan dan produk lokal sehingga mampu meningkatkan permintaan terhadap komoditas daerah, memperluas akses pasar, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya, tata kelola kebijakan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan Program MBG. Sistem tata kelola yang baik akan memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi program dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai pasok pangan. Dengan demikian, implementasi MBG tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pelayanan publik, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan sistem pangan lokal.

Gambar 1. Model Konseptual Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal Berkelanjutan



Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan

masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemberdayaan UMKM dan kelembagaan ekonomi lokal. Selain itu, implementasi program ini berkontribusi terhadap pencapaian beberapa tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, optimalisasi implementasi MBG berpotensi menghasilkan manfaat yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi lokal yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai kebijakan peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Program ini mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan lokal, pemberdayaan petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM. Dengan demikian, MBG berkontribusi terhadap penguatan rantai pasok pangan lokal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Keberhasilan implementasi MBG sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antarpemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta tata kelola birokrasi yang terintegrasi. Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa Program MBG dapat diposisikan sebagai kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pembangunan ekonomi lokal berkelanjutan.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyusunan mekanisme implementasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, serta pelaku ekonomi lokal. Pengadaan bahan pangan hendaknya memprioritaskan produk lokal yang memenuhi standar kualitas sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di daerah.

Peningkatan kapasitas petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM perlu menjadi bagian dari strategi implementasi MBG agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan. Transparansi sistem pengadaan, pengawasan kualitas pangan, serta evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi program juga perlu terus ditingkatkan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris menggunakan pendekatan kuantitatif, metode campuran (mixed methods), atau studi kasus di berbagai daerah untuk mengukur secara langsung dampak implementasi MBG terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan pelaku usaha, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Gizi Nasional. (2025). *Pedoman Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: Badan Gizi Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2017). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice* (6th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Food and Agriculture Organization. (2022). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022*. Rome: FAO.
- Food and Agriculture Organization. (2024). *School Food and Nutrition Framework*. Rome: FAO.

- Hadinata, M. (2026). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia di bawah Presiden Prabowo: Analisis Kebijakan, Fiskal, dan Politik Berdasarkan Bukti Internasional. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 1–18.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jakarta: Bappenas.
- Makambombu, S. (2026). Local Food, Centralized Governance, and the Limits of Policy Localization in Indonesia's Free Nutritious School Meal Program. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 7(1), 44–61.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *SME and Entrepreneurship Outlook 2023*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
- Setiabudi, T., Rahman, A., & Nugraha, D. (2025). Free Nutritious Meals Policy as a Stimulus for Strengthening the Economic of Farmers and Traditional Markets. *Indonesian Journal of Social Science Research*, 4(2), 112–124.
- Suprpto, F. A., Widodo, A., & Prasetyo, B. (2025). A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 185–201.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- World Bank. (2022). *Investing in Nutrition: The Foundation of Development*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects: Investing in Inclusive Growth*. Washington, DC: World Bank.
- World Food Programme. (2022). *State of School Feeding Worldwide 2022*. Rome: World Food Programme.